

# Transformasi Tata Kelola Pasca-Banjir di Bima: Inovasi Administratif dalam Rehabilitasi Ekosistem Berkelanjutan

Nurlaila<sup>1</sup>, Nurhasanah<sup>2</sup>, Kasman<sup>3</sup>, Haeril<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP Bima

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Email: [lailaamin975@gmail.com](mailto:lailaamin975@gmail.com)

## Abstract

*Recurring floods in Bima City during the 2016–2025 period have caused substantial ecological, social, and economic damage, while also exposing weaknesses in institutional coordination, overlapping administrative authorities, and the limited integration of sustainability-oriented environmental rehabilitation policies. This study aims to analyze the transformation of post-flood administrative governance through an innovative Adaptive Management approach to support sustainable ecosystem rehabilitation. A qualitative case study design was employed in Bima City, utilizing in-depth interviews, field observations, and policy document analysis as the primary data collection methods. The data were analyzed thematically to identify patterns of inter-institutional collaboration, the adaptive capacity of local government, and the enabling and constraining factors affecting ecosystem rehabilitation. The findings reveal that the success of post-flood rehabilitation is largely determined by the strengthening of collaborative governance involving government institutions, local communities, the private sector, academia, and civil society organizations through cross-sectoral coordination, integrated communication, clearly defined roles and responsibilities, and participatory decision-making processes. Furthermore, governance adaptability is reflected in policy innovations related to watershed rehabilitation, the enhancement of regional ecological functions, and the integration of sustainability principles into local development planning. These findings demonstrate that post-disaster ecosystem rehabilitation constitutes a process of administrative transformation that strengthens ecological resilience, enhances institutional adaptive capacity, and promotes resilient and sustainable regional development.*

**Keywords:** *Adaptive Governance; Ecosystem Rehabilitation; Collaborative Governance; Post-Flood Recovery; Sustainable Development.*

## Abstrak

Banjir berulang yang terjadi di Kota Bima selama periode 2016–2025 telah menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, sekaligus mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan rehabilitasi lingkungan yang berorientasi keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi tata kelola administratif pasca-banjir melalui pendekatan Pengelolaan Adaptif inovatif dalam mendukung rehabilitasi ekosistem berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kota Bima, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antarlembaga, kapasitas adaptif pemerintah daerah,

serta faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi pasca-banjir sangat ditentukan oleh penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi sosial melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi terintegrasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta pengambilan keputusan partisipatif. Selain itu, adaptivitas tata kelola tercermin dalam inovasi kebijakan rehabilitasi daerah aliran sungai, penguatan fungsi ekologis wilayah, dan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem pasca-bencana merupakan proses transformasi administratif yang memperkuat ketahanan ekologis, meningkatkan kapasitas adaptif kelembagaan, serta mendukung pembangunan daerah yang resilien dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Adaptif; Rehabilitasi Ekosistem; Collaborative Governance; Pascabanjir; Pembangunan Berkelanjutan.

## Pendahuluan

Bencana banjir merupakan fenomena yang berdampak luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta semakin meningkat karena perubahan iklim dan tekanan antropogenik terhadap ekosistem (misalnya degradasi lahan dan sistem drainase yang buruk) (Yulianti & Pratama, 2024); (Sari & Kurniasih, 2024); (Kurniawan & Sopanah, 2024). Banjir yang berulang tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta, tetapi juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang memperlemah ketahanan lingkungan dan masyarakat terhadap risiko bencana berikutnya, pemulihan lingkungan pasca-banjir sering kali terhambat oleh pendekatan yang parsial dan sektoral, tanpa integrasi yang kuat antar pemangku kebijakan, lembaga, dan masyarakat lokal (Rahmawati & Hadi, 2022); (Widodo & Riyanto, 2022); (Haryanto & Kurniawan, 2023); (Nugroho & Setiawan, 2023); (Fadli & Syafrudin, 2023); (Rahayu & Hadiyanto, 2023).

Kota Bima mengalami banjir berulang sejak 2016 hingga 2025 dalam periode tersebut, banjir secara konsisten menimbulkan kerusakan lingkungan, infrastruktur, permukiman, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir di Kota Bima merupakan masalah struktural yang memerlukan pendekatan tata kelola pasca-bencana yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya rehabilitasi pasca-banjir masih menghadapi kendala administratif dan kelembagaan, seperti lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, tumpang tindih kewenangan, serta kebijakan pemulihan yang bersifat jangka pendek dan belum berorientasi pada keberlanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa tata kelola penanggulangan bencana memerlukan kolaborasi multi-aktor agar mitigasi, respons, dan rehabilitasi pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

Secara konseptual, pendekatan Pengelolaan Adaptif dalam tata kelola lingkungan menekankan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi kebijakan lingkungan (Folke et al, 2005); (Ansell & Gash 2008); (Chaffin et al. 2014); (Armitage et al. 2019). kajian empiris yang mengaitkan Pengelolaan Adaptif inovatif dengan tata kelola administratif pasca-banjir di tingkat daerah terutama dalam konteks rehabilitasi ekosistem yang berkelanjutan masih relatif terbatas. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek teknis penanggulangan bencana atau mitigasi saja, dan kurang mengeksplorasi peran tata kelola administratif dan kolaborasi kelembagaan dalam pemulihan lingkungan secara holistik.

Peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tahun 2020 dengan judul *Bima Regional Government Institutional Capabilities in Disaster Management* kajian tersebut menemukan bahwa kebijakan penanggulangan bencana belum menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Daerah. Sumber daya keuangan masih minim, di mana paganggaran penanggulangan bencana daerah belum mencapai angka 1 persen sehingga penanggulangan bencana belum maksimal dan penelitian tahun 2023 *Manajemen Pra Bencana Alam Di Kabupaten Bima Dalam Perspektif Collaborative Governance* membahas mengenai collaborative governance terutama pada tahap pra bencana, dan sejauh mana kerjasama serta upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai aktor untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Bima.

Menindaklanjuti hasil Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai potensi penanganan banjir berkelanjutan melalui pendekatan Pengelolaan Adaptif dalam tata kelola lingkungan yang menekankan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan lingkungan. Fokus utamanya yaitu Pengelolaan Adaptif Inovatif Pasca-Banjir di Bima: Analisis Tata Kelola Administratif dalam Rehabilitasi Ekosistem Berkelanjutan.

Temuan penelitian diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian empiris terkait integrasi administrasi publik dan pemulihan lingkungan pascabencana, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola rehabilitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tata kelola administratif pascabanjir dengan Pengelolaan Adaptif inovatif sebagai kerangka konseptual utama, yang menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam rehabilitasi ekosistem pascabencana.

Penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan pemulihan lingkungan pasca-banjir di Bima, khususnya kerusakan ekosistem, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta belum optimalnya keterlibatan aktor lintas sektor. Selanjutnya, penelitian menganalisis praktik Pengelolaan Adaptif inovatif dalam tata kelola administratif pasca-banjir, meliputi mekanisme koordinasi antar lembaga, pembagian kewenangan, dan pola kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan mengacu pada prinsip engagement, shared motivation, dan collective action. Analisis ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

efektivitas rehabilitasi ekosistem secara berkelanjutan, termasuk hambatan administratif, kelembagaan, dan kapasitas aktor. Hasil penelitian dirumuskan dalam bentuk model konseptual dan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada penguatan tata kelola administratif pasca-banjir yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung pengurangan risiko bencana dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Literatur terdahulu menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pengurangan risiko bencana, namun implementasinya pada tahap rehabilitasi ekosistem pasca-banjir masih menghadapi berbagai kendala administratif dan kelembagaan di tingkat daerah. Sementara itu, pendekatan Pengelolaan Adaptif telah banyak dibahas dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi penerapannya dalam tata kelola administratif pascabencana masih relatif terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada aspek teknis rehabilitasi, dengan perhatian yang minim terhadap dimensi kewenangan, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas aktor. Selain itu, keterbatasan studi kontekstual lokal, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial-ekologis spesifik seperti Bima, menciptakan celah penelitian yang perlu diisi agar rekomendasi kebijakan lebih kontekstual, adaptif, dan aplikatif. Penelitian ini mengisi kekosongan antara teori Pengelolaan Adaptif dan praktik administrasi pasca-bencana dengan menghadirkan bukti empiris dari Bima dan model tata kelola operasional yang dapat dijadikan pedoman kebijakan untuk rehabilitasi ekosistem berkelanjutan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis tata kelola administratif pasca-banjir di Kota Bima. Kerangka analisis bertumpu pada konsep Pengelolaan Adaptif inovatif yang menekankan pengelolaan kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang dalam rehabilitasi ekosistem pasca-bencana. Penelitian difokuskan pada: Praktik Pengelolaan Adaptif inovatif dalam tata kelola administratif pasca-banjir di Bima, mekanisme koordinasi dan kolaborasi kelembagaan dalam rehabilitasi ekosistem, dan Faktor pendukung dan penghambat tata kelola rehabilitasi ekosistem berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen kebijakan, dan observasi praktik rehabilitasi lingkungan.

Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola tata kelola, bentuk kolaborasi antar aktor, serta faktor yang memengaruhi efektivitas rehabilitasi ekosistem berkelanjutan. Partisipan penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam tata kelola pasca-banjir dan rehabilitasi ekosistem. Partisipan meliputi: Aparatur Pemerintah Daerah, Pemangku kepentingan nonpemerintah, Masyarakat terdampak banjir. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada wilayah yang terdampak banjir dan menjadi lokasi pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pasca-bencana.

## Hasil dan Diskusi

### **Kolaborasi Tata Kelola Administratif Pasca-Banjir dalam Rehabilitasi Ekosistem Berkelanjutan di Kota Bima**

Banjir yang berulang di Kota Bima selama kurun waktu 2016–2025 telah menunjukkan bahwa bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa alam yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena sosial-ekologis yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara lingkungan, kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks tersebut, rehabilitasi ekosistem pasca-banjir membutuhkan tata kelola administratif yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor, kepentingan, dan sumber daya ke dalam suatu mekanisme kolaboratif yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi lingkungan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran maupun program teknis, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, kolaborasi tata kelola administratif menjadi elemen strategis yang menentukan efektivitas pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

Koordinasi antar perangkat daerah merupakan fondasi utama dalam tata kelola rehabilitasi pasca-banjir. Dalam praktiknya, rehabilitasi ekosistem melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, perbedaan prioritas program, dan keterbatasan integrasi data. Kondisi tersebut mengakibatkan berbagai program rehabilitasi berjalan secara parsial sehingga dampak yang dihasilkan belum mampu menjawab kebutuhan pemulihan ekosistem secara menyeluruh. Situasi ini memperlihatkan bahwa masalah utama bukan semata-mata pada aspek teknis rehabilitasi, melainkan pada kemampuan institusi dalam membangun sinergi administrasi yang terintegrasi.

Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, koordinasi antarlembaga merupakan instrumen penting untuk mengatasi kompleksitas permasalahan publik. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Christopher Ansell dan Alison Gash yang menegaskan bahwa permasalahan publik yang bersifat kompleks membutuhkan collaborative governance sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolektif. Rehabilitasi ekosistem pasca-banjir di Bima menunjukkan karakteristik masalah yang kompleks karena menyangkut dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara bersamaan. Oleh sebab itu, koordinasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai aktivitas administratif rutin, tetapi sebagai proses pembangunan kesepahaman bersama untuk mencapai tujuan kolektif dalam pemulihan lingkungan dan pengurangan risiko bencana di masa mendatang.

Secara normatif, kerangka koordinasi rehabilitasi pasca-bencana telah diatur dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi koordinasi di tingkat daerah masih menghadapi kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik lapangan. Beberapa program rehabilitasi lingkungan belum sepenuhnya terhubung dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga menyebabkan lemahnya kesinambungan program pemulihan jangka panjang.

Selain koordinasi antarinstansi pemerintah, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas tata kelola rehabilitasi ekosistem. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi lingkungan dan risiko bencana. Dalam berbagai kegiatan rehabilitasi, masyarakat berpartisipasi melalui kerja bakti pembersihan sungai, penanaman pohon, konservasi daerah aliran sungai, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi ekosistem sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun kemitraan yang produktif dengan komunitas lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi lingkungan sejalan dengan konsep *adaptive governance* yang dikembangkan oleh Carl Folke dan koleganya. Menurut perspektif ini, tata kelola lingkungan yang efektif harus mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan kebijakan formal sehingga menghasilkan kapasitas adaptif yang lebih kuat. Dalam konteks Bima, pengalaman masyarakat menghadapi banjir berulang merupakan sumber pengetahuan yang berharga untuk merancang strategi rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik sosial-ekologis setempat. Oleh karena itu, proses pemulihan lingkungan tidak boleh bersifat top-down semata, tetapi harus memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan.

Di samping masyarakat, sektor swasta juga memiliki kontribusi strategis dalam mendukung rehabilitasi pasca-banjir. Beberapa perusahaan dan pelaku usaha lokal terlibat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang difokuskan pada kegiatan penghijauan, penyediaan sarana sanitasi, bantuan pemulihan infrastruktur lingkungan, serta dukungan logistik bagi masyarakat terdampak. Meskipun kontribusi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem tata kelola daerah, keberadaannya menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas rehabilitasi ekosistem. Keterlibatan sektor swasta menjadi penting mengingat keterbatasan sumber daya fiskal pemerintah daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan pemulihan lingkungan pascabencana.

Organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat juga memainkan peran signifikan dalam proses rehabilitasi. Berbagai organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sebagai agen pemberdayaan yang membantu meningkatkan kesadaran lingkungan. Melalui kegiatan edukasi, pelatihan, pendampingan komunitas, dan advokasi kebijakan, organisasi sosial mampu memperluas jangkauan program rehabilitasi hingga ke tingkat akar rumput. Keberadaan organisasi sosial memperlihatkan bahwa tata kelola rehabilitasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kapasitas birokrasi, tetapi juga pada kemampuan membangun jaringan kolaboratif yang melibatkan aktor nonpemerintah.

Pembagian peran dan kewenangan menjadi aspek penting dalam menjamin efektivitas kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam rehabilitasi pasca-banjir. Dalam beberapa kasus, terdapat program yang dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi tanpa koordinasi yang memadai sehingga menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya. Sebaliknya, terdapat pula tugas-tugas tertentu yang tidak dilaksanakan secara optimal karena masing-masing lembaga menganggap kewenangan tersebut berada pada institusi lain. Kondisi ini menunjukkan perlunya kejelasan pembagian peran agar setiap aktor dapat menjalankan fungsi secara efektif.

Secara konseptual, pembagian kewenangan dapat dianalisis melalui pendekatan *institutional capacity* yang menekankan pentingnya kejelasan struktur, fungsi, dan tanggung jawab organisasi. Kapasitas kelembagaan yang kuat memungkinkan setiap aktor memahami batas kewenangan dan ruang kolaborasi yang dimilikinya. Dalam konteks rehabilitasi ekosistem di Bima, BPBD berperan sebagai koordinator utama penanggulangan bencana, sementara Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap pemulihan kualitas lingkungan, dan Dinas Pekerjaan Umum berfokus pada rehabilitasi infrastruktur pendukung. Kejelasan fungsi tersebut menjadi syarat penting untuk menghindari konflik kewenangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil analisis, pembagian kewenangan ideal dapat digambarkan melalui matriks kolaborasi yang menempatkan BPBD sebagai *leading sector* koordinasi, Bappeda sebagai integrator perencanaan, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana rehabilitasi ekologis, Dinas PUPR sebagai pelaksana rehabilitasi infrastruktur, pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai fasilitator partisipasi masyarakat, serta organisasi sosial dan sektor swasta sebagai mitra pendukung. Struktur tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi ekosistem memerlukan pendekatan multiaktor yang saling melengkapi dan tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi secara mandiri.

Mekanisme komunikasi menjadi faktor berikutnya yang menentukan kualitas kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antaraktor masih cenderung berlangsung secara sektoral dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Padahal, dalam situasi pascabencana, kecepatan dan akurasi informasi sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan. Ketidaksinkronan

data mengenai tingkat kerusakan lingkungan, kebutuhan rehabilitasi, dan prioritas program dapat menghambat efektivitas kebijakan pemulihan. Oleh karena itu, penguatan sistem komunikasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola rehabilitasi pasca-banjir.

Dalam perspektif teori jaringan kebijakan (*policy network*), komunikasi merupakan mekanisme yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, sumber daya, dan pengetahuan antaraktor. Semakin kuat jaringan komunikasi yang terbentuk, semakin tinggi pula kapasitas kolaboratif yang dimiliki suatu sistem tata kelola. Pada kasus Bima, pembangunan forum koordinasi lintas sektor secara berkala dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan prioritas program, dan mengurangi potensi konflik kepentingan antar lembaga.

Pengambilan keputusan bersama merupakan tahap lanjutan dari proses komunikasi kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan rehabilitasi masih didominasi oleh institusi pemerintah, sementara keterlibatan aktor nonpemerintah cenderung bersifat konsultatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* belum sepenuhnya mencapai tingkat partisipasi substantif. Padahal, keputusan yang dihasilkan melalui proses deliberatif cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat karena mencerminkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Menurut teori *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell dan Gash, keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses bersama. Ketiga komponen tersebut memiliki relevansi tinggi dalam konteks rehabilitasi pasca-banjir di Bima. Dialog yang intensif memungkinkan aktor-aktor yang berbeda kepentingan menemukan titik temu, sementara kepercayaan menjadi fondasi bagi terbentuknya komitmen kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya kepercayaan, kolaborasi akan mudah terjebak dalam konflik kepentingan dan persaingan kewenangan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kapasitas kepemimpinan. Kepemimpinan kolaboratif berperan sebagai katalisator yang mampu menyatukan berbagai aktor dalam satu visi rehabilitasi yang berkelanjutan. Pemimpin yang efektif tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan penggerak kolaborasi. Dalam konteks Bima, penguatan kapasitas kepemimpinan lintas sektor menjadi faktor strategis untuk mempercepat transformasi tata kelola pasca-banjir yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kolaborasi tata kelola administratif pasca-banjir merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan rehabilitasi ekosistem berkelanjutan di Kota Bima. Koordinasi antar perangkat daerah, keterlibatan masyarakat, partisipasi sektor swasta, kontribusi organisasi sosial, kejelasan pembagian kewenangan, komunikasi lintas sektor, serta pengambilan keputusan bersama

merupakan komponen yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem tata kelola.

### **Adaptivitas Tata Kelola dalam Rehabilitasi Ekosistem Berkelanjutan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptivitas tata kelola dalam rehabilitasi ekosistem pasca-banjir di Kota Bima menjadi faktor strategis yang menentukan keberhasilan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Fenomena banjir berulang yang terjadi dalam kurun waktu hampir satu dekade telah mengubah cara pandang pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana. Jika sebelumnya kebijakan pascabencana lebih berorientasi pada respons darurat dan pemulihan infrastruktur fisik, maka perkembangan dinamika lingkungan dan meningkatnya frekuensi kejadian banjir mendorong munculnya pendekatan yang lebih adaptif dengan mengintegrasikan aspek rehabilitasi ekosistem ke dalam agenda pembangunan daerah. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma dari disaster response menuju adaptive environmental governance yang menempatkan ekosistem sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan wilayah.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa inovasi kebijakan rehabilitasi lingkungan pasca-banjir di Bima berkembang melalui serangkaian program yang menghubungkan agenda penanggulangan bencana dengan pengelolaan sumber daya alam. Inovasi tersebut diwujudkan melalui program rehabilitasi daerah aliran sungai, penanaman kembali kawasan kritis, penguatan sistem drainase berbasis lingkungan, pengendalian sedimentasi sungai, serta pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir. Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan struktural yang bertumpu pada pembangunan fisik menuju pendekatan ekologis yang berupaya memperbaiki fungsi lingkungan sebagai instrumen mitigasi jangka panjang. Pergeseran tersebut menjadi penting karena kerusakan ekosistem selama ini terbukti memperbesar dampak banjir dan mempercepat degradasi lingkungan perkotaan.

Dari perspektif administrasi publik, inovasi kebijakan yang muncul tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merumuskan program baru, tetapi juga menunjukkan kapasitas institusional dalam merespons perubahan lingkungan yang kompleks. Menurut Osborne dan Brown, inovasi sektor publik merupakan proses penciptaan solusi baru yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus menjawab tantangan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme birokrasi konvensional. Dalam konteks Bima, inovasi rehabilitasi lingkungan menjadi bentuk respons administratif terhadap meningkatnya risiko ekologis yang tidak lagi dapat diatasi dengan pola penanganan bencana yang bersifat sektoral dan jangka pendek.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lapangan mengalami perkembangan

yang cukup signifikan. Adaptasi kebijakan terlihat dari perubahan prioritas pembangunan yang mulai memperhitungkan kerentanan ekologis sebagai dasar perencanaan program. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperhatikan faktor penyebab banjir seperti kerusakan tutupan lahan, sedimentasi sungai, dan penurunan kualitas lingkungan. Dengan demikian, strategi pemulihan tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas pascabencana semata, melainkan sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

Kemampuan adaptasi tersebut sejalan dengan pandangan Holling mengenai Adaptive Management yang menekankan pentingnya pembelajaran kebijakan melalui pengalaman empiris. Dalam teori ini, ketidakpastian lingkungan tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai sumber pembelajaran untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menghadapi banjir berulang telah menghasilkan akumulasi pengetahuan kelembagaan yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian strategi rehabilitasi lingkungan berdasarkan evaluasi kejadian sebelumnya.

Lebih lanjut, data penelitian memperlihatkan bahwa proses adaptasi tidak hanya terjadi pada level kebijakan, tetapi juga pada level implementasi program. Aparatur pemerintah mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan rehabilitasi lingkungan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekologis setiap wilayah terdampak. Pendekatan ini memungkinkan program rehabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal sekaligus mempertimbangkan kondisi ekosistem yang berbeda-beda. Fleksibilitas tersebut menjadi elemen penting dalam tata kelola adaptif karena memungkinkan kebijakan tetap relevan meskipun menghadapi perubahan kondisi yang dinamis.

Temuan ini mendukung argumentasi Folke yang menjelaskan bahwa adaptive governance merupakan kapasitas sistem kelembagaan untuk merespons perubahan melalui pembelajaran sosial, kolaborasi, dan inovasi kebijakan. Dalam kasus Bima, kemampuan adaptasi pemerintah tidak muncul secara spontan, melainkan berkembang melalui interaksi berkelanjutan antara pengalaman bencana, tekanan lingkungan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Aspek lain yang menjadi perhatian penelitian adalah integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pemulihan pasca-banjir. Hasil analisis menunjukkan bahwa rehabilitasi lingkungan mulai diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi. Kebijakan yang sebelumnya berorientasi pada pemulihan cepat kini mulai mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat. Integrasi tersebut terlihat dari upaya memasukkan program rehabilitasi ekosistem ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta penguatan regulasi yang mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep Sustainable Development yang diperkenalkan oleh Brundtland Commission. Perspektif ini menegaskan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks rehabilitasi pasca-banjir, prinsip keberlanjutan mengharuskan pemerintah tidak hanya memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga memastikan bahwa proses pemulihan menghasilkan peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana pada masa mendatang.

Penelitian menemukan bahwa integrasi keberlanjutan juga tercermin dalam upaya penguatan ketahanan ekosistem sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini menempatkan rehabilitasi lingkungan sebagai investasi jangka panjang yang mampu menghasilkan manfaat ekologis sekaligus sosial-ekonomi. Rehabilitasi kawasan hulu, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penguatan fungsi daerah resapan air menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem lingkungan yang lebih tangguh terhadap ancaman banjir.

Namun demikian, implementasi rehabilitasi ekosistem berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Meskipun berbagai perangkat daerah memiliki peran dalam pemulihan lingkungan, pembagian kewenangan yang belum sepenuhnya terintegrasi sering kali menimbulkan tumpang tindih program. Kondisi ini menyebabkan efektivitas rehabilitasi lingkungan belum mencapai hasil optimal karena setiap aktor masih cenderung bekerja berdasarkan mandat sektoral masing-masing.

Selain itu, keterbatasan sumber daya keuangan juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program rehabilitasi jangka panjang. Pemulihan ekosistem memerlukan investasi yang besar dan berkelanjutan, sementara alokasi anggaran daerah sering kali lebih difokuskan pada kebutuhan infrastruktur yang bersifat mendesak. Akibatnya, berbagai program rehabilitasi lingkungan mengalami keterbatasan cakupan maupun keberlanjutan pelaksanaan.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya kapasitas teknis dan administratif dalam mengintegrasikan data lingkungan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam banyak kasus, kebijakan rehabilitasi masih didasarkan pada kebutuhan jangka pendek dibandingkan hasil analisis ekologis yang komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju tata kelola adaptif memerlukan dukungan sistem informasi lingkungan yang lebih kuat agar proses perencanaan dapat dilakukan secara berbasis bukti.

Di sisi lain, penelitian menemukan sejumlah faktor pendukung yang memperkuat implementasi rehabilitasi ekosistem berkelanjutan. Salah satu faktor terpenting adalah meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana. Pengalaman menghadapi banjir berulang telah membentuk kesadaran bahwa keberlanjutan

lingkungan merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya kerangka regulasi nasional yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berbagai ketentuan dalam sistem perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Keberadaan regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi tata kelola pasca-banjir menuju model yang lebih integratif.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan rehabilitasi ekosistem. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi nonpemerintah, dan sektor swasta memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya, pengetahuan, serta inovasi yang memperkuat kapasitas pemulihan lingkungan. Fenomena ini sesuai dengan pandangan Ansell dan Gash yang menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelesaian persoalan publik yang kompleks.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa adaptivitas tata kelola merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan rehabilitasi ekosistem pasca-banjir di Bima. Adaptivitas tidak hanya diwujudkan melalui inovasi kebijakan, tetapi juga melalui kemampuan institusi untuk belajar, menyesuaikan strategi, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, serta membangun kolaborasi lintas aktor. Semakin tinggi kapasitas adaptif yang dimiliki pemerintah daerah, semakin besar pula peluang terciptanya sistem rehabilitasi lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa rehabilitasi ekosistem pasca-bencana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis pemulihan lingkungan, melainkan sebagai proses transformasi tata kelola yang memerlukan inovasi administratif, pembelajaran kelembagaan, dan orientasi keberlanjutan. Dalam konteks Bima, transformasi tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun ketahanan ekologis daerah serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana pada masa depan.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemulihan lingkungan pasca-banjir di Kota Bima tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis, tetapi terutama oleh kemampuan institusi membangun tata kelola kolaboratif dan adaptif yang terintegrasi. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi sosial menjadi fondasi strategis dalam memperkuat efektivitas rehabilitasi ekosistem melalui koordinasi lintas sektor, pembagian kewenangan yang jelas, komunikasi yang terhubung, serta pengambilan keputusan partisipatif. Pada saat yang

sama, kapasitas adaptif pemerintah dalam mengembangkan inovasi kebijakan, melakukan pembelajaran kelembagaan, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, dan merespons dinamika sosial-ekologis secara fleksibel telah mendorong transformasi tata kelola dari pendekatan responsif menuju model pembangunan yang resilien. Dengan demikian, rehabilitasi ekosistem pasca-banjir merupakan proses transformasi administratif yang memperkuat ketahanan ekologis, mengurangi risiko bencana, dan menopang pembangunan berkelanjutan di masa depan.

## Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Armitage, D., Berkes, F., & Doubleday, N. (2019). Adaptive co-management and environmental governance. *Environmental Science and Policy*, 92, 1–10.
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship. *Ecology and Society*, 19(3), 56.
- Djalante, R., Shaw, R., & DeWit, A. (2020). Building resilience against biological hazards and pandemics: COVID-19 and its implications for disaster risk reduction and management. *Progress in Disaster Science*, 6, 100080.
- Fadli, M., & Syafrudin, A. (2023). Inovasi kebijakan publik dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 177–194.
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441–473.
- Haryanto, J. T., & Kurniawan, T. (2023). Kolaborasi multiaktor dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 45–61.
- Kurniawan, B., & Sopanah. (2024). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 1–17.
- Nugroho, R., & Setiawan, A. (2023). Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 211–228.
- Nuryanti, S., & Hermawan, D. (2022). Tata kelola kolaboratif dalam rehabilitasi lingkungan pasca-bencana. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 425–438.
- Prasetyo, B., & Kismartini. (2021). Governance adaptif dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 89–101.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2022). Collaborative governance dalam penanggulangan bencana di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(2), 157–176.
- Rahayu, S., & Hadiyanto. (2023). Pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan daerah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 7(1), 52–69.
- Rahmawati, I., & Hadi, S. P. (2022). Pengelolaan daerah aliran sungai berbasis kolaborasi. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 10(3), 241–257.

- Sari, N., & Kurniasih, D. (2024). Collaborative governance dalam pengelolaan lingkungan perkotaan berkelanjutan. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 85–101.
- Suryani, L., & Mulyadi, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem pasca-banjir. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34(4), 371–384.
- Wahyudi, A., & Purnomo, E. P. (2021). Adaptive governance dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Indonesia. *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 153–169.
- Widodo, J., & Riyanto, B. (2022). Ketahanan sosial dan pemulihan pascabencana berbasis komunitas. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 315–332.
- Yulianti, D., & Pratama, R. A. (2024). Integrasi kebijakan lingkungan dan mitigasi bencana di daerah aliran sungai. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 28(1), 37–54.
- Yusran, R., & Akbar, D. (2021). Peran stakeholder dalam rehabilitasi lingkungan pasca-banjir. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 7(2), 101–118.